

## **ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2007-2011**

**Emi Nuraini dan Kirwani**

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

[aini.cheez@gmail.com](mailto:aini.cheez@gmail.com)

### **Abstrak**

Kota Mojokerto pada tahun 2009-2011 mengalami pertumbuhan yang positif namun pertumbuhan tersebut menjadi problematika dengan tingginya besaran inflasi yang melebihi pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 7,57 %. Disamping itu pada tahun 2007-2011 Kota Mojokerto tetap bertahan pada peringkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiga terendah Sejava Timur. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui sektor basis dan nonbasis, pergeseran dan perubahan struktur perekonomian, serta sektor potensial Kota Mojokerto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor basis Kota Mojokerto yaitu sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor nonbasis Kota Mojokerto adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan serta sektor bangunan dan konstruksi. Perekonomian Kota Mojokerto tidak mengalami perubahan dan pergeseran struktur yang berarti yakni tetap didominasi oleh sektor tersier. Berdasarkan analisis diketahui bahwa sektor yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sektor bangunan dan konstruksi.

**Kata Kunci:** sektor potensial, bangunan dan konstruksi.

### **Abstract**

During periods between 2009 and 2011, economic growth in Mojokerto has been increased. However, it had problematic on the number of inflation over the economic growth exactly 7,57%. Besides that, in that periods this city has existancy on Gross Domestic Product (GDP) with third lowest rank in East Java. The aims of this research are knowing the basis and nonbasis sectors, shift and changed on economic structure, and potential sector in Mojokerto. The results of this research show that basis sectors of Mojokerto City on electricity, gas and water supply; trading, hotel and restaurant; transportation and communication; financial, rent and company service; and services sector. On the other hand, nonbasis sector in Mojokerto are agriculture; mining and quarrying; manufacturing; and building and construction sectors. The economic on Mojokerto has not shift and change significantly because dominancy on tersier sector. Base on analysis, the potential sectors have developed are building and construction sector.

**Keywords:** potential sectors, building and construction

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha untuk mengembangkan perekonomian sehingga menimbulkan perubahan pada struktur perekonomian. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno: 2010).

Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi, dimana penentuan kebijakan dan pertanggungjawaban pembiayaan maupun pengelolaan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah menekankan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi kurang optimal apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dibidang ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi saat ini masih menjadi target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah disamping pembangunan fisik dan sosial. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi tersebut sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Oleh karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing (Sjafrizal: 2012).

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan melalui tingkat pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara makro pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan wilayah yang dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi yaitu: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, gas, dan air bersih, Bangunan, Perdagangan, Perhotelan dan restoran, Pengangkutan dan komunikasi, Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan, Sektor jasa lainnya. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) berarti meningkat pula kesejahteraan dan kemakmuran penduduk.

Sejalan dengan paradigma tersebut, maka pembangunan Kota Mojokerto merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk mengetahui potensi ekonomi Kota Mojokerto diperlukan suatu metode yang digunakan untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan-kebijakan demi tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang progresif. Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada tahun 2007-2011 berturut-turut sebesar 5,98%, 5,27%, 5,14%, 6,09%, 6,62%. Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto menunjukkan penurunan pada tahun 2007-2009 dan tahun 2010-2011 mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang positif tersebut bisa menjadi titik harapan bagi perbaikan ekonomi Kota Mojokerto, namun pertumbuhan tersebut menjadi problematika dengan tingginya besaran inflasi yang melebihi pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 7,57 %. Disamping itu pada tahun 2007-2011 Kota Mojokerto tetap bertahan pada peringkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiga terendah Sejava Timur.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka muncul beberapa pertanyaan: (1) Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kota Mojokerto? (2) Bagaimanakah perubahan dan pergeseran struktur perekonomian Kota Mojokerto? (3) Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor potensial dalam perekonomian Kota Mojokerto?

Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non

basis dalam perekonomian Kota Mojokerto. (2) untuk mengetahui perubahan dan pergeseran struktur perekonomian Kota Mojokerto. (3) untuk mengetahui sektor-sektor apakah yang menjadi sektor potensial dalam perekonomian Kota Mojokerto.

## Kajian Teori

### Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan *Gross Domestic Product* (GDP) pada satu tahun tertentu melebihi tingkat pertambahan penduduk. Perkembangan GDP yang berlaku dalam satu masyarakat yang dibarengi oleh perubahan dan modernisasi dalam struktur ekonomi yang umumnya tradisional (Sukirno dalam Prishardoyo: 2008).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno: 2010). Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain.

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad: 2010).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi, modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Gambaran secara luas tentang teori pembangunan ekonomi membahas tentang hal-hal, seperti moneter, fiskal perpajakan, import dan eksport, tahap-tahap pertumbuhan, dan berbagai kebijakan makro lainnya. Dalam hal ini objek dari pembangunan ekonomi, mencangkup seluruh wilayah dari suatu negara sehingga ruang gerak dari pembangunan ekonomi dibatasi oleh wilayah satu negara. Dalam ilmu ekonomi pembangunan dapat menjelaskan daerah maju dengan daerah terbelakang atau hubungan antar kota dengan daerah belakangnya. Akan tetapi, sifat analisisnya bersifat general, artinya berlaku umum tidak seluruh hubungan, tidak peduli di mana tempat (negara) hubungan itu terjadi. Berikut

merupakan beberapa teori pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya adalah (1) Teori ekonomi klasik. Adam Smith merupakan ekonom yang dijuluki sebagai nabi ekonomi. Dialah orang pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis. Smith memiliki pemikiran bahwa Teori ekonomi klasik menciptakan sistem ekonomi pasar bebas yang akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi *full employment* dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. Pemerintah tidak perlu telalu mencampuri urusan perekonomian.

(2) Teori Harrod-Domar. Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh.

(3) Teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan diperkenalkan oleh Samuelson. Teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan mengemukakan bahwa setiap daerah perlu melihat sektor yang potensial besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki keunggulan kompetitif untuk dikembangkan.

(4) Teori pertumbuhan Neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow dari Amerika Serikat dan T. W. Swan dari Australia. Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antar kapital (K) dan tenaga kerja (L). Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat

sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Misalnya, usaha perkebunan yang dibuat bersinergi dengan usaha peternakan. Rumput/limbah perkebunan dapat dijadikan makanan ternak, sedangkan teletong/kotoran ternak bisa dijadikan pupuk untuk tanaman perkebunan. Dengan demikian, pertumbuhan sektor yang satu mendorong sektor yang lain, begitu juga sebaliknya. Menggabungkan kebijakan jalur cepat (*turnpike*), dan mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat.

(5) Teori basis ekspor murni dikembangkan dalam kerangka ilmu ekonomi regional. Pencetus teori ini adalah Tiebout. Dasar pemikiran teori basis adalah karena industri basis menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di dalam maupun di luar daerah, maka penjualan hasil keluar daerah itu akan mendatangkan arus pendapatan ke dalam daerah tersebut. Arus pendapatan ini menyebabkan kenaikan konsumsi dan kenaikan investasi di daerah tersebut yang pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja. Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas: basis dan nonbasis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat dengan kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Itulah sebabnya dikatakan basis, sedangkan nonbasis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena

itu, pertumbuhannya tergantung pada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya sektor ini bersifat *endogenous* (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Pada mulanya teori basis ekspor hanya memasukkan ekspor murni ke dalam pengertian ekspor. Akan tetapi, kemudian dibuat definisi ekspor yang lebih luas. Ekspor tidak hanya mencakup barang/jasa yang dijual ke luar termasuk juga di dalamnya barang atau jasa yang dibeli orang dari luar daerah meskipun transaksi terjadi di dalam daerah tersebut. Kegiatan lokal yang melayani pariwisata adalah pekerjaan basis karena mendatangkan uang dari luar daerah. Demikian pula kegiatan lokal di perkotaan seperti restoran, bengkel, usaha grosir dan swalayan yang melayani orang dari luar daerah adalah pekerjaan basis. Jadi pada pokoknya kegiatan yang hasilnya dijual ke luar daerah atau mendatangkan uang dari luar daerah adalah kegiatan basis sedangkan kegiatan *service* (nonbasis) adalah kegiatan yang melayani kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri, baik pembeli maupun sumber uangnya berasal dari daerah itu sendiri.

Teori basis ekspor membuat asumsi pokok bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen (*independent*) dalam pengeluaran. Artinya. Semua unsur pengeluaran lain terkait (*dependent*) terhadap pendapatan.

Secara tidak langsung hal ini berarti diluar pertambahan alamiah, hanya peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah karena sektor-sektor lain terikat peningkatannya oleh peningkatan pendapatan daerah. Sektor lain hanya meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat. Jadi, satu-satunya yang bisa meningkatkan secara bebas adalah ekspor. Ekspor tidak terkait didalam siklus pendapatan daerah. Asumsi kedua ialah bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan (*intercept*).

#### **Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah**

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah merupakan keputusan dan intervensi pemerintah baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Melalui kebijakan tersebut akan tercipta suatu kondisi sosial yang diharapkan sehingga mampu mendorong proses pembangunan daerah yang diinginkan baik pada masa sekarang maupun periode berikutnya di masa mendatang.

Kebijakan pada tingkat daerah diperlukan karena kondisi, permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki oleh setiap daerah umumnya berbeda sehingga kebijakan yang diperlukan juga berbeda pula. Oleh karena itu kebijakan yang diberlakukan secara umum pada tingkat nasional tidak sesuai untuk menanggulangi permasalahan pembangunan pada masing-masing daerah. Untuk memaksimalkan hasil pembangunan ekonomi daerah maka

diperlukan keterpaduan penerapan kebijakan daerah yang saling terkait sehingga tercipta kesinergian dalam proses pembangunan ekonomi daerah (Sjafrizal: 2012).

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah merupakan keputusan dan intervensi pemerintah baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Melalui kebijakan tersebut akan tercipta suatu kondisi sosial yang diharapkan sehingga mampu mendorong proses pembangunan kearah yang diinginkan baik pada masa sekarang maupun periode berikutnya di masa mendatang. Kebijakan pada tingkat daerah diperlukan karena kondisi, permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki oleh setiap daerah umumnya berbeda sehingga kebijakan yang diperlukan juga berbeda pula. Antara satu daerah dengan daerah lainnya terdapat berbagai kaitan sosial ekonomi sehingga kondisi dan perkembangan pada daerah tertentu akan berpengaruh pada kondisi dan pembangunan pada daerah terkait. Oleh karena itu kebijakan yang diberlakukan secara umum pada tingkat nasional tidak sesuai untuk menanggulangi permasalahan pembangunan pada masing-masing daerah. Untuk memaksimalkan hasil pembangunan ekonomi daerah maka diperlukan keterpaduan penerapan kebijakan daerah yang saling terkait sehingga tercipta kesinergian dalam proses pembangunan ekonomi daerah (Sjafrizal: 2012).

Sasaran atau target utama dari kebijakan pembangunan ekonomi daerah ada dua meliputi: (1) Kemakmuran Wilayah. Salah satu sasaran utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mewujudkan kemakmuran wilayah bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pemerintah

bermaksud menciptakan kondisi fisik daerah yang maju meliputi sarana dan prasarana, perumahan dan lingkungan pemukiman, kegiatan ekonomi masyarakat, fasilitas layanan sosial, dan lain-lainnya. Dengan kondisi yang seperti ini maka besar kemungkinan pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat pesat karena dukungan kondisi daerah yang kondusif sehingga penanaman modal meningkat dengan daya tarik daerah dalam bentuk keuntungan eksternal yang mampu memanjakan investor bila melakukan investasi pada daerah tersebut. Dengan besaran modal yang semakin mengalir maka akan menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menarik imigran dari daerah lain. (2) Kemakmuran Masyarakat. Bila kemakmuran masyarakat merupakan sasaran utama dalam pembangunan ekonomi daerah maka tekanan utama pembangunan akan lebih diarahkan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pengembangan pendidikan, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna. Selain itu perhatian juga akan diarahkan pada peningkatan kegiatan produksi masyarakat. Dalam kaitan dengan hal ini biasanya laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja akan bergerak melambat karena pembangunan terfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan yang memerlukan jangka waktu yang lama.

### **Evaluasi Kebijakan Ekonomi Daerah**

Evaluasi kebijakan ekonomi daerah sangat penting dilakukan dalam kerangka perekonomian untuk dapat mengetahui seberapa berpengaruh kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan dampak

positif sesuai titik tujuan utama yang telah ditetapkan. Dengan adanya evaluasi ini dapat pula diketahui factor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan regional tersebut sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang perlu diterapkan pada periode mendatang.

Evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan dua cara meliputi: (1) Evaluasi Komprehensif (Makro). Evaluasi komprehensif dilakukan dengan cara membandingkan kondisi pembangunan sesudah dan sebelum dilakukannya kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil jika kinerja pembangunan dalam wilayah cakupan setelah kebijakan dilakukan ternyata lebih baik dibandingkan kondisi sebelum kebijakan diambil demikian pula sebaliknya. (2) Evaluasi Parsial. Evaluasi pelaksanaan kebijakan secara parsial dilakukan dengan menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tingkat program atau proyek. Evaluasi ini dikatakan parsial karena hanya meninjau pada sebagian kegiatan pembangunan daerah yang belum tentu mampu mewakili kondisi pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu dilakukan penilaian terhadap program atau proyek berskala besar yang mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan perekonomian daerah bersangkutan.

Pada dasarnya kebijakan ekonomi daerah dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal bersangkut paut dengan pengendalian penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga arah pembangunan menjadi lebih focus dan optimal. Sedangkan kebijakan moneter berhubungan

dengan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat termasuk lembaga terkait. Kebijakan fiskal lebih memungkinkan untuk diterapkan di tingkat daerah karena dapat dikendalikan pada batas daerah bersangkutan dibandingkan dengan kebijakan moneter yang lebih bersifat makro.

### **Sektor Potensial**

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk dikembangkan dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko: 2002).

Secara harfiah potensi ekonomi dalam kerangka pembangunan daerah dapat diartikan sebagai kesanggupan, kekuatan dan kemampuan di bidang ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerahnya masing-masing. Potensi ekonomi dapat berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, letak geografis daerah yang dekat dengan sarana dan prasarana serta pendukung lainnya.

Pada dasarnya terdapat beberapa ukuran pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya dapat menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya sebagai sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan, yaitu: (1) Analisis *Location Quotient* (LQ). *Location Quotient* atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap

besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Ada banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja. Analisis LQ sangat menarik jika dilakukan dalam bentuk *time-series/trend*. Perkembangan LQ bisa dilihat untuk suatu sektor tertentu pada kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Hal ini dapat memancing analisis lebih lanjut apakah faktor-faktor yang membuat daerah tersebut tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari rata-rata nasional. Hal ini bisa menggambarkan kekuatan/kelemahan wilayah dibandingkan secara relatif dengan wilayah yang lebih luas. Potensi yang positif digunakan dalam strategi pengembangan wilayah sedangkan faktor-faktor yang membuat potensi sektor di suatu wilayah lemah, perlu ditindaklanjuti untuk ditanggulangi agar lebih berkembang atau dianggap tidak prioritas. (2) Untuk melengkapi analisis LQ maka digunakan juga analisis *Shift Share* yang akan menunjukkan kemampuan sektor basis yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga akan mempermudah daerah tersebut untuk mengembangkan lebih jauh potensi yang dimilikinya. Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui faktor penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu

kurun waktu ke kurun waktu yang berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan ekonomi nasional. Hasil analisis *shift share* akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam PDRB dibandingkan Provinsi/Nasional. (3) Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dilakukan untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi, terutama struktur ekonomi yang lebih menekankan pada kriteria pertumbuhan. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dari sisi pertumbuhan sehingga diharapkan dapat teridentifikasi sektor unggulan, baik dari sisi kontribusi maupun sisi pertumbuhan. MRP adalah kegiatan membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih kecil maupun dalam skala yang lebih luas (Atmanti: 2009).

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif ini menggambarkan fakta-fakta tentang suatu permasalahan yang diteliti sehingga perlu pemusatan perhatian pada masalah-masalah yang actual dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data statistik berupa angka-angka dari dokumentasi BPS.

Data merupakan komponen terpenting dalam sebuah penelitian karena data tersebut akan membantu peneliti dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Data tersebut diperoleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan studi

kepastakaan pdan dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan mempelajari bacaan-bacaan yang berkaitan dan mendukung penelitian yang dilakukan sedangkan metode dokumentasi, yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan (Arikunto: 2006).

Penelitian ini menggunakan analisis sebagai berikut:

### Analisis location quotient

Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor basis dan nonbasis suatu daerah tertentu. Berikut rumus yang menggunakan nilai tambah (Tarigan: 2009):

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t} \quad (1)$$

Dimana:

- $v_i$  = Pendapatan sektor i suatu daerah
- $v_t$  = Total pendapatan daerah tersebut
- $V_i$  = Pendapatan sektor i secara nasional
- $V_t$  = Total pendapatan secara nasional

Kriterianya adalah:

$LQ > 1$  artinya peranan sektor tersebut di daerah Kota Mojokerto lebih menonjol daripada peranan sektor sektor yang sama dalam perekonomian Propinsi Jawa Timur. Menunjukkan bahwa daerah Kota Mojokerto surplus akan produk sektor i dan mengekspornya ke daerah lain.

$LQ < 1$  artinya peranan sektor tesebut di daerah Kota Mojokerto lebih kecil daripada peranan sektor yang sama dalam perekonomian Propinsi Jawa Timur.

$LQ = 1$  artinya peranan sektor i di daerah Kota Mojokerto adalah sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian Propinsi Jawa Timur.

### Analisis shif share

Melalui analisis *shift share*, maka perubahan dan pergeseran struktural perekonomian wilayah Kota Mojokerto ditentukan oleh tiga komponen. Berikut notasi analisis *shift share* (Tarigan: 2009):

*Provincial share* ( $P_{si}$ )

$$P_{s,i,t} = E_{r,i,t-n} \left( \frac{E_{N,t}}{E_{N,t-n}} \right) - E_{r,i,t-n} \quad (2)$$

*Proportional shift* ( $P_{r,i}$ )

$$P_{r,i,t} = E_{r,i,t-n} \left\{ \left( \frac{E_{r,i,t}}{E_{r,i,t-n}} \right) - \left( \frac{E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right) \right\} \quad (3)$$

*Differential shift* ( $D_{r,i}$ )

$$D_{r,i,t} = \left[ \frac{\Delta E_{r,i,t}}{E_{r,i,t-n}} - \frac{\Delta E_{N,i,t}}{E_{N,i,t-n}} \right] \times E_{r,i,t-n} \quad (4)$$

Dari perhitungan tersebut dapat diartikan bahwa bila:

$Pr,i < \Delta E_{r,i}$  maka pertumbuhan produksi di daerah tersebut cenderung mendorong pertumbuhan propinsi

$Pr,i > \Delta E_{r,i}$  maka pertumbuhan produksi di daerah tersebut cenderung menghambat pertumbuhan propinsi

$Ps,i < 0$  maka sektor tersebut tumbuh relatif lambat di tingkat kota

$Ps,i > 0$  maka sektor tersebut tumbuh relatif cepat di tingkat kota

$Dr,i < 0$  maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di daerah lain atau dengan kata lain sektor tersebut tidak memiliki keuntungan lokasional yang baik.

$Dr,i > 0$  maka sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di

daerah lain atau dengan kata lain sektor tersebut memiliki keuntungan lokasional yang baik.

**Analisis model rasio pertumbuhan (MRP)**

Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPR)

Dalam hal ini RPR membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor dalam konteks propinsi Jawa Timur dengan PDRB Kota Mojokerto. Rumus untuk menghitung RPR adalah sebagai berikut:

$$\frac{\Delta E_i R / E_i R}{\Delta ER / ER} \tag{5}$$

Keterangan:

$\Delta E_i R$  = perubahan PDRB sektor *i* di wilayah referensi

$\Delta ER$  = perubahan PDRB di wilayah referensi

$E_i R$  = PDRB sektor *i* di wilayah referensi

$ER$  = PDRB di wilayah referensi

Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPS)

Dalam hal ini RPS membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor dalam konteks Kota Mojokerto dengan pertumbuhan sektor propinsi Jawa Timur. Rumus untuk menghitung RPS adalah sebagai berikut:

$$\frac{\Delta E_i J / E_i J}{\Delta EJ / EJ} \tag{6}$$

Keterangan:

$\Delta E_i J$  = perubahan PDRB sektor *i* di wilayah studi

$\Delta EJ$  = perubahan PDRB di wilayah studi

$E_i J$  = PDRB sektor *i* di wilayah studi

$EJ$  = PDRB di wilayah studi

Kriteria pengukuran Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

**Klasifikasi 1**, yaitu nilai (+) dan (+) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

**Klasifikasi 2**, yaitu nilai (+) dan (-) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol di tingkat propinsi namun belum menonjol di tingkat kabupaten/kota.

**Klasifikasi 3**, yaitu (-) dan (+) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang tidak menonjol di tingkat propinsi, dan menonjol di tingkat kabupaten/kota.

**Klasifikasi 4**, yaitu (-) dan (-) berarti sektor tersebut tidak memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Location Quotient (LQ)**

Tabel 1 Analisis Location Quotient (LQ)

No	Sektor	Rata-rata	Tanda
1	Pertanian	0.082	-
2	Pertambangan dan penggalian	0	-
3	Industri Pengolahan	0.62	-
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.52	+
5	Bangunan dan Konstruksi	0.268	-
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.196	+
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.156	+
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.442	+
9	Jasa-jasa	2.148	+

Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) sebagaimana terlihat pada tabel menunjukkan bahwa rata-rata LQ dari sembilan sektor tersebut adalah sebagai berikut:

LQ > 1 terdiri dari sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis. Artinya peranan sektor-sektor tersebut di Kota Mojokerto lebih menonjol daripada peranan sektor-sektor yang sama dalam perekonomian Jawa Timur. hal ini menunjukkan bahwa Kota Mojokerto surplus akan produk sektor-sektor tersebut dan mampu mengekspornya ke daerah lain.

LQ < 1 yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; serta sektor bangunan dan konstruksi yang mengindikasikan bahwa peranan sektor-sektor tersebut di Kota Mojokerto lebih kecil daripada peranan sektor yang sama dalam perekonomian Jawa Timur. Berarti sektor tersebut merupakan sektor nonbasis yang belum mampu melayani pasar di luar Kota Mojokerto dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah tersebut. Peranan sektor nonbasis tersebut adalah sebagai sektor penunjang dari sektor basis. Dengan demikian keterpaduan antara sektor basis dan nonbasis merupakan unsur penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto.

Dari kelima sektor basis di atas, yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Apabila dilihat lebih jauh terhadap sub sektornya, selama tahun 2007-2011 sub sektor yang berperan dominan adalah sektor listrik dimana sepanjang tahun tersebut selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Sampai dengan tahun

2011 layanan jaringan gas Kota Mojokerto belum tersedia sehingga sub sektor ini tidak memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Mojokerto. Sedangkan untuk sub sektor air bersih pertumbuhannya melambat pada tahun 2007, begitu pula pada tahun 2011.

### Analisis Shift Share

Tabel 2 Analisis Shift Share

No	Sektor	Ps,i	Pr,i	Dri
1	Pertanian	3,926.22	-2149.6318	-1,152.45
2	Pertambangan	0.00	0	0.00
3	Industri	49,895.27	-15652.79	- 21,549.15
4	Listrik	9,975.25	-2783.4952	2,336.37
5	Bangunan	2,409.17	-233.74226	757.45
6	Perdagangan	103,668.75	43450.9966	- 50,047.77
7	Pengangkutan	39,456.02	34447.1487	-7,975.45
8	Keuangan	21,779.01	3828.53	-2,847.79
9	Jasa-jasa	53,939.62	-7861.8873	6,012.82
<b>Total</b>		<b>285,049.31</b>	<b>53045.1286</b>	- <b>74,465.97</b>

Berdasarkan komponen Ps,i di atas dapat diketahui bahwa sektor yang memiliki pertumbuhan paling cepat di Kota Mojokerto bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata nasional adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang memiliki komponen Ps,i paling tinggi yaitu sebesar 103,668.75 menyusul kemudian sektor Jasa-jasa sebesar 53,939.62 dan sektor industri pengolahan sebesar 49,895.27. Namun secara keseluruhan sektor-

sektor yang ada di Kota Mojokerto memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata nasional. Dapat dikatakan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi regional Kota Mojokerto yang lebih tinggi di masa mendatang adalah dengan mendorong sektor perdagangan, hotel dan restoran untuk tumbuh lebih besar lagi dari sekarang.

Sementara berdasarkan komponen Pr,i dapat diketahui bahwa sektor yang maju adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (43450.9966), sektor pengangkutan dan komunikasi (34447.1487), dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (3828.53). Sedangkan sektor yang lain termasuk sektor yang belum maju. Oleh karena itu untuk memajukan sektor yang belum maju perlu membenahi dan memperkuat sistem pada beberapa sektor tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna mempercepat terjadinya pembangunan ekonomi di Kota Mojokerto, dimana nantinya dapat digunakan sebagai wadah untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto.

Di sisi lain, berdasarkan komponen Dr,i diketahui bahwa sektor jasa-jasa (6,012.82), sektor listrik, gas dan air bersih (2,336.37), dan sektor bangunan dan konstruksi (757.45) memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di daerah lain atau dengan kata lain sektor tersebut memiliki keuntungan lokasional yang baik.

Apabila nilai *provincial share* dan *differential shift* positif maka sektor yang bersangkutan dalam perekonomian daerah menempati posisi yang baik untuk daerah yang bersangkutan. Beberapa sektor yang memiliki nilai *provincial share* dan *differential shift* positif adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi serta sektor jasa-jasa. Hal ini membuktikan bahwa ketiga sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang relatif cepat dibandingkan daerah lain.

Struktur perekonomian Kota Mojokerto tidak mengalami perubahan dan pergeseran yang berarti yakni tetap didominasi oleh sektor tersier. Beberapa sektor yang mendominasi perekonomian Kota Mojokerto adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi yang lebih kecil dari ketiga sektor tersebut. Sektor tersier memiliki nilai *proportional shift* yang positif yang menandakan bahwa Kota Mojokerto berspesialisasi pada sektor tersebut dan secara nasional tumbuh lebih cepat. Sedangkan *differential shift* memiliki nilai negatif sehingga dapat diartikan bahwa sektor tersier tidak memiliki keunggulan kompetitif dan mengalami pertumbuhan yang lambat di Kota Mojokerto atau dengan kata lain sektor tersebut tidak memiliki keuntungan lokasional yang baik. Disamping itu perkembangan PDRB Kota Mojokerto pada tahun 2007-2011 menunjukkan kontribusi yang lebih besar dari sektor tersier

dibandingkan sektor lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa struktur perekonomian Kota Mojokerto didominasi oleh sektor tersier.

**Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)**

Tabel 3 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

No	Sektor	RPR		RPS	
		Nilai	Tanda	Nilai	Tanda
1	Pertanian	0.45	-	0.17	-
2	Pertambangan dan Penggalian	0.00	-	0.00	-
3	Industri Pengolahan	0.69	-	0.28	-
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.72	-	1.03	+
5	Bangunan/Konstruksi	0.90	-	1.32	+
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.42	+	1.01	+
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.87	+	1.81	+
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.18	+	1.13	+
9	Jasa-jasa	0.85	-	1.04	+

Berdasarkan hasil analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) menunjukkan bahwa sektor-sektor yang menonjol di tingkat Propinsi Jawa Timur maupun Kota Mojokerto adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan sektor yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan. Sedangkan sektor yang menonjol di Kota Mojokerto dan rendah di tingkat Propinsi Jawa Timur adalah sektor listrik, gas

dan air bersih; sektor bangunan dan konstruksi; serta sektor jasa-jasa.

Selain itu, analisis MRP memperlihatkan bahwa hampir seluruh sektor di Propinsi Jawa Timur memiliki nilai RPS lebih dari satu kecuali sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang menonjol di Kota Mojokerto berdasarkan kriteria pertumbuhan. Sementara di Propinsi Jawa Timur hampir semua sektor memiliki pertumbuhan yang rendah kecuali tiga sektor yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Dari ketiga analisis di atas dapat diketahui sektor yang potensial sebagai berikut:

Berdasarkan analisis LQ diketahui bahwa sektor basis Kota Mojokerto adalah sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor nonbasis Kota Mojokerto adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan serta sektor bangunan dan konstruksi

Berdasarkan analisis Shift Share diketahui bahwa sektor yang menempati posisi yang baik di Kota Mojokerto adalah sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan dan konstruksi; dan sektor jasa-jasa.

Berdasarkan analisis MRP diketahui bahwa sektor yang potensial Kota Mojokerto adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Jika ditarik garis besar sektor potensial di Kota Mojokerto adalah sektor bangunan dan konstruksi

karena sektor tersebut bukan termasuk sektor yang unggul (basis) namun di Kota Mojokerto menempati posisi yang baik dengan nilai *provincial share* dan *differential shift* positif. Sektor bangunan dan konstruksi termasuk sektor yang tumbuh cepat dibandingkan rata-rata nasional maupun sektor yang sama di daerah lain. Disamping itu jika melihat hasil analisis MRP diketahui bahwa sektor bangunan dan konstruksi merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan menonjol di Kota Mojokerto namun rendah di Provinsi Jawa Timur sehingga sektor tersebut berpotensi untuk dikembangkan menjadi motor penggerak perekonomian Kota Mojokerto.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan analisis di atas maka dapat disimpulkan (1) Sektor basis yang mendominasi perekonomian Kota Mojokerto adalah sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor nonbasis Kota Mojokerto adalah sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan serta sektor bangunan dan konstruksi. (2) Struktur perekonomian Kota Mojokerto tidak mengalami perubahan dan pergeseran yang berarti yakni tetap didominasi oleh sektor tersier. (3) Sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai motor penggerak perekonomian Kota Mojokerto adalah sektor bangunan dan konstruksi.

### Saran

1. Kota Mojokerto harus memberikan prioritas terhadap sektor bangunan dan konstruksi untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Kota Mojokerto tanpa harus

mengabaikan sektor-sektor lain terutama sektor industri yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Mojokerto.

2. Perlu dikembangkan kerjasama secara intensif dan berkelanjutan dengan daerah sekitar Kota Mojokerto terutama daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Mojokerto yaitu Kabupaten Mojokerto dengan mensinergikan program-program atau kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil pembangunan yang optimal tanpa mengabaikan kerjasama dengan daerah lain. Seperti program pembangunan kota industri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan (Edisi Revisi 5)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Atmanti, Hastarini D. 2009. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Ekonomi dan Manajemen* vol 19, No 1.
- Prishardoyo, Bambang. 2008. Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2002-2005. *Jurnal Ekonomi* Vol 1, No. 1.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.